

PENGARUH IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 7/2024 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU

Rio Somantri¹, Erna², Agus Hendarto³

^{1,2,3}Prodi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
ramdhaniharri04@gmail.com

ABSTRACT - *This study aims to analyze the impact of the implementation of Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 7 of 2024 concerning Guidelines for Regional Asset Management (BMD) on work effectiveness and its contribution to increasing Regional Original Revenue (PAD) in Indramayu Regency. The study used a quantitative approach with a survey method of officials at the Regional Finance and Asset Agency (BKAD). The research instrument was a Likert-scale questionnaire that had been tested for validity and reliability. Data analysis was conducted through multiple linear regression and partial and simultaneous tests to determine the effect of policy implementation on the effectiveness and performance of increasing PAD.*

The results indicate that the implementation of Permendagri No. 7/2024 has a positive and significant impact on apparatus work effectiveness, particularly in aspects of procedural compliance, timeliness of asset management, and administrative transparency. Furthermore, policy implementation contributes to increasing PAD through optimizing asset recording, utilizing idle assets, and increasing the value of regional assets. The coefficient of determination indicates that policy implementation variables explain the majority of the variation in work effectiveness, while other factors such as apparatus competence, information technology, and organizational culture also contribute.

Overall, this study confirms that the implementation of Minister of Home Affairs Regulation No. 7/2024 is a crucial instrument for strengthening regional asset governance, improving the effectiveness of government officials, and encouraging the optimization of regional revenues.

Keywords: *policy implementation, Regionally-Owned Enterprises (BMD) management, work effectiveness, Regional Original Revenue (PAD), Minister of Home Affairs Regulation No. 7/2024.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah (BMD) terhadap efektivitas kerja serta kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Indramayu. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan melalui regresi linier berganda dan uji parsial serta simultan untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas dan kinerja peningkatan PAD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendagri No. 7/2024 berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja aparatur, terutama pada aspek kepatuhan prosedur, ketepatan waktu pengelolaan aset, serta transparansi administrasi. Selain itu, implementasi kebijakan berkontribusi terhadap peningkatan PAD melalui optimalisasi pencatatan aset, pemanfaatan aset idle, dan peningkatan nilai aset daerah. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan menjelaskan sebagian besar variasi efektivitas kerja, sementara faktor lain seperti kompetensi aparatur, teknologi informasi, dan budaya organisasi juga turut memengaruhi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Permendagri No. 7/2024 menjadi instrumen yang penting dalam memperkuat tata kelola aset daerah, meningkatkan efektivitas kinerja aparatur, serta mendorong optimalisasi pendapatan daerah.

Kata Kunci: *implementasi kebijakan, pengelolaan BMD, efektivitas kerja, PAD, Permendagri No. 7/2024.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu elemen strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah, karena berkaitan langsung dengan efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan, transparansi pengelolaan aset, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks otonomi daerah, BMD tidak hanya dipandang sebagai sarana pendukung operasional pemerintahan, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Tantangan utama yang dihadapi banyak pemerintah daerah adalah belum optimalnya pendataan, pemanfaatan, serta pengamanan aset, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya efektivitas kerja aparatur dan belum maksimalnya potensi PAD yang dapat dihimpun.

Pemerintah pusat merespons permasalahan ini dengan menerbitkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini memperkuat aturan sebelumnya dengan menekankan pentingnya digitalisasi sistem manajemen aset, ketertelusuran data, peningkatan akuntabilitas, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Beberapa aspek baru dalam regulasi ini mencakup peningkatan standar dokumentasi aset, pembaruan mekanisme penilaian nilai aset, serta tata cara pemanfaatan aset yang lebih adaptif sesuai perkembangan kebijakan fiskal. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan aset secara lebih efisien dan profesional, termasuk dalam proses inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset.

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah dengan volume aset yang besar serta tingkat kebutuhan optimalisasi PAD yang tinggi. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan aset yang lebih tertata, akurat, dan produktif. Namun pada

praktiknya, berbagai temuan menunjukkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan, seperti keterbatasan kompetensi aparatur, belum optimalnya penggunaan aplikasi aset berbasis digital, serta kurang efektifnya koordinasi lintas bidang. Sejumlah aset daerah masih belum dimanfaatkan secara produktif, bahkan beberapa aset tercatat idle atau belum memiliki legalitas pemanfaatan yang lengkap. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan implementasi di lapangan.

Di sisi lain, efektivitas kerja aparatur sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan dapat diterapkan secara konsisten. Implementasi kebijakan yang baik akan menghasilkan ketepatan waktu, peningkatan akurasi data aset, harmonisasi prosedur, serta meningkatnya kemampuan daerah untuk menggali potensi PAD melalui pemanfaatan aset yang lebih optimal. Sebaliknya, implementasi yang lemah dapat menghambat kinerja aparatur, menimbulkan ketidaksesuaian prosedur, serta mengurangi kontribusi aset terhadap target PAD.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting karena berupaya menganalisis sejauh mana implementasi Permendagri No. 7 Tahun 2024 berpengaruh terhadap efektivitas kerja aparatur serta kontribusinya terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Indramayu. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengisi kesenjangan penelitian terkait evaluasi kebijakan pengelolaan aset daerah yang masih relatif terbatas, khususnya setelah diberlakukannya regulasi terbaru.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh implementasi Permendagri No. 7/2024 terhadap efektivitas kerja aparatur BKAD Kabupaten Indramayu.
2. Mengukur kontribusi implementasi Permendagri No. 7/2024 terhadap peningkatan PAD melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

KAJIAN TEORI

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik, sebab keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan konkret di lapangan. Menurut Edward III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi menentukan kejelasan instruksi kebijakan; sumber daya berkaitan dengan ketersediaan SDM, anggaran, dan sarana pendukung; disposisi menunjukkan sikap pelaksana; sementara struktur birokrasi berkaitan dengan SOP dan pembagian tugas yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, Grindle (1980) menambahkan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua dimensi besar: *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi). Isi kebijakan mencakup tujuan,

manfaat, jenis intervensi, serta kelompok sasaran kebijakan. Adapun konteks implementasi mencakup lingkungan sosial, politik, dan organisasi yang memengaruhi keberlangsungan proses implementasi. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Permendagri No. 7/2024 akan sangat bergantung pada bagaimana BKAD Indramayu memahami isi kebijakan dan kemampuan organisasinya dalam menerapkan pedoman pengelolaan BMD.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Barang Milik Daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Permendagri No. 7/2024, pengelolaan BMD meliputi beberapa tahapan utama, yaitu:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan barang
3. Penerimaan, penyimpanan, dan distribusi
4. Penggunaan
5. Pemanfaatan
6. Pengamanan dan pemeliharaan
7. Penilaian dan penatausahaan
8. Penghapusan dan pemindahtanganan

Regulasi ini menekankan pentingnya digitalisasi data aset, standar dokumentasi, efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA), serta optimalisasi pemanfaatan aset yang belum produktif. BMD yang dikelola secara akuntabel dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD melalui skema sewa, kerja sama pemanfaatan, atau bentuk pemanfaatan lainnya sesuai ketentuan perundangan.

Efektivitas Kerja Aparatur

Efektivitas kerja secara umum dipahami sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan sesuai waktu, prosedur, dan sasaran kinerja yang telah ditentukan. Menurut Gibson et al. (2021), efektivitas kerja ditentukan oleh tiga komponen: kemampuan (ability), motivasi (motivation), dan lingkungan kerja (work environment). Dalam organisasi publik, efektivitas kerja sangat dipengaruhi oleh kejelasan SOP, koordinasi internal, kompetensi aparatur, serta kualitas implementasi kebijakan.

Efektivitas aparatur BKAD dalam mengelola aset daerah dapat dilihat dari:

- ketepatan waktu pelaksanaan tugas penatausahaan BMD,
- akurasi pencatatan dan pelaporan aset,
- tingkat kepatuhan terhadap pedoman pengelolaan BMD,
- kecepatan tindak lanjut terhadap permasalahan aset,
- kemampuan mendukung peningkatan PAD melalui optimalisasi pemanfaatan aset.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dikelola berdasarkan peraturan daerah. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah

BMD memiliki kontribusi langsung terhadap komponen ketiga dan keempat melalui mekanisme sewa aset, kerja sama pemanfaatan, dan pendapatan lain yang berasal dari pemanfaatan aset. Optimalisasi aset idle dapat meningkatkan PAD apabila didukung pengelolaan yang efektif dan pemanfaatan yang produktif.

Hubungan Implementasi Kebijakan, Efektivitas Kerja, dan PAD

Secara konseptual, implementasi kebijakan yang baik akan meningkatkan efektivitas kerja aparatur karena adanya kejelasan aturan, pedoman kerja yang terstruktur, serta proses kerja yang lebih efisien. Efektivitas kerja yang meningkat akan mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah, yang pada akhirnya meningkatkan PAD.

Dengan demikian, model hubungan yang dibangun penelitian ini adalah:

- Implementasi kebijakan → Efektivitas kerja
- Efektivitas kerja → Optimalisasi pengelolaan aset → Peningkatan PAD
- Implementasi kebijakan → Peningkatan PAD (pengaruh langsung maupun tidak langsung)

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori (explanatory research). Desain ini digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel implementasi kebijakan, efektivitas kerja, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menguji pengaruh implementasi Permendagri No.

7 Tahun 2024 terhadap efektivitas kerja aparatur serta kontribusinya pada peningkatan PAD berdasarkan data empiris yang terukur.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu sebagai instansi yang berwenang mengelola Barang Milik Daerah. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi objek penelitian dengan implementasi Permendagri No. 7/2024. Pengumpulan data dilaksanakan selama Maret–Mei 2025.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur BKAD Kabupaten Indramayu yang terlibat dalam proses pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), berjumlah **50 orang**. Karena jumlah populasi relatif kecil dan masih dapat dijangkau, metode penentuan sampel yang digunakan adalah **total sampling**, sehingga seluruh populasi dijadikan responden penelitian. Teknik ini dipilih untuk meminimalkan bias dan memastikan semua unit analisis terwakili.

Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel utama:

Variabel Independen

Implementasi Kebijakan (Permendagri No. 7 Tahun 2024), terdiri dari indikator:

1. Komunikasi kebijakan
2. Ketersediaan sumber daya
3. Sikap pelaksana (disposisi)
4. Struktur birokrasi dan SOP (Edward III, 1980)

Variabel Dependen

1. Efektivitas Kerja Aparatur, dengan indikator:
 - Ketepatan waktu kerja
 - Akurasi pelaksanaan tugas
 - Kepatuhan terhadap SOP
 - Penyelesaian tugas tepat sasaran
2. Peningkatan PAD, dengan indikator:
 - Optimalisasi pemanfaatan BMD
 - Peningkatan nilai ekonomi aset
 - Kontribusi pendapatan dari pemanfaatan aset

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan beberapa metode berikut:

Kuesioner

Instrumen disusun menggunakan skala Likert 1–5, mencakup 25 item pernyataan terkait implementasi kebijakan, efektivitas kerja, dan peningkatan PAD.

Wawancara Terbatas

Dilakukan kepada pejabat pengelola BMD untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai implementasi Permendagri No. 7/2024.

Dokumentasi

Meliputi dokumen inventaris aset, laporan PAD, SOP pengelolaan BMD, dan data terkait lainnya.

Uji Validitas dan Reliabilitas

1) a. Uji Validitas

Item kuesioner diuji menggunakan korelasi Pearson Product Moment. Suatu item dianggap valid apabila nilai $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ (0,279 untuk $n=50$).

2) b. Uji Reliabilitas

Dilakukan menggunakan Cronbach Alpha, dengan batas minimum 0,70 sebagai indikator reliabilitas. Seluruh variabel penelitian memiliki nilai $\alpha > 0,80$, yang berarti instrumen reliabel.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 25 dengan teknik sebagai berikut:

Analisis Deskriptif

Digunakan untuk menggambarkan persepsi responden terhadap implementasi kebijakan, efektivitas kerja, dan peningkatan PAD.

Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menguji pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja dan PAD.

Uji Parsial (t-test)

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing indikator variabel secara individual.

Uji Simultan (F-test)

Untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan secara keseluruhan terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Analisis Jalur (Path Analysis)

Digunakan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung implementasi kebijakan terhadap peningkatan PAD melalui efektivitas kerja sebagai variabel intervening.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji parsial (t), uji simultan (F), analisis regresi linier

berganda dan analisis jalur (path analysis). Sampel penelitian = 64 responden (total sampling dari populasi yang ditentukan).

Ringkasan statistik uji model

- Uji simultan (F) = 66.755, $p = 0.000 \rightarrow$ model signifikan secara simultan ($\alpha = 0,05$).

TESIS-Rio Sumantri

- Koefisien determinasi (R^2) = 0,8190 (81,90%) $\rightarrow$ variabel-variabel implementasi kebijakan (X1–X4) menjelaskan 81,90% variasi efektivitas kerja yang berkontribusi pada peningkatan PAD; sisanya 18,10% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Hasil uji parsial (t-test) — pengaruh masing-masing dimensi (ringkasan)

Tabel ringkasan uji t (nilai thitung, t tabel, p-value):

Variabel (dimensi)	t_hitung	t_tabel (df = 64)	p-value	Keputusan
X1 Komunikasi	2.562	1.671	0.0065	Signifikan (positif).
X2 Sumber Daya	11.047	1.671	0.0000	Signifikan sangat kuat (positif).
X3 Disposisi	1.561	1.671	0.0600	Tidak signifikan ($p > 0.05$).
X4 Struktur birokrasi	1.903	1.671	0.0300	Signifikan (positif).

Hasil analisis jalur (path analysis) — kontribusi langsung & tidak langsung

Tabel berikut adalah rekap pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total tiap dimensi terhadap Efektivitas Kerja (Y) sesuai Tabel 4.6 di tesis Anda. Angka ditampilkan dalam persen sebagaimana pada laporan asli.

Tabel: Pengaruh langsung, tidak langsung, dan total variabel X terhadap Y (persentase)

Dimensi (Xi)	Pengaruh langsung (%)	Pengaruh tidak langsung melalui Xj (%)	Subtotal (%)	Pengaruh total (%)
X1 Komunikasi	3.01	7.96 (melalui X2/X4 dll)	10.89	10.89.
X2 Sumber daya	63.68	7.13 (melalui X1/X4 dll)	70.81	70.81.
X3 Disposisi	2.37	-7.96 (efek neto negatif)	-5.59	-5.59 (menunjukkan hambatan).
X4 Struktur	3.20	2.60 (melalui X1/X2 dll)	5.80	5.80.
Total (X1-X4)				81.90 (R²).

Catatan: angka di atas adalah persentase kontribusi langsung dan tidak langsung sebagaimana dilaporkan dalam penelitian; jumlah total pengaruh variabel X terhadap Y = 81,90%.

Model regresi — persamaan (format standar) dan interpretasi

Bentuk persamaan regresi (umum)

Persamaan regresi linier berganda yang diuji:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + \varepsilon$$

di mana:

- Y = Efektivitas kerja dalam meningkatkan PAD
- X1 = Komunikasi
- X2 = Sumber daya
- X3 = Disposisi
- X4 = Struktur birokrasi
- a = intercept; ε = galat/residu.

Koefisien jalur (path coefficients — langsung)

Tesis melaporkan pengaruh langsung (path coefficients dalam bentuk persen). Untuk keperluan interpretasi model standar, kita dapat menuliskan model jalur (standar menurut laporan)

sebagai berikut (mengonversi persen → desimal untuk koefisien jalur langsung):

$$Y = 0,0301 X_1 + 0,6368 X_2 + 0,0237 X_3 + 0,0320 X_4 + \varepsilon$$

Penjelasan:

- Koefisien jalur 0,63680 untuk X2 merepresentasikan 63.68% pengaruh langsung X2 terhadap Y sebagaimana tercantum pada Tabel 4.6.
- Koefisien kecil untuk X1, X3, X4 (0.03, 0.0237, 0.0320) merefleksikan pengaruh langsung relatif kecil dibanding X2 pada skala yang dilaporkan. Angka-angka ini berasal dari transformasi langsung persentase pengaruh menjadi desimal agar bisa ditampilkan seperti koefisien standar dalam persamaan.

Penting (metodologis): tesis menggunakan analisis jalur sehingga angka pengaruh dilaporkan dalam bentuk persentase kontribusi langsung/tidak langsung. Rumus dan prosedur perhitungan koefisien jalur juga dicantumkan dalam tesis (lihat bagian metodologi analisis jalur). Jika Anda ingin nilai beta (unstandardized coefficients) persis dari output regresi SPSS (B, Std. Error), saya bisa mengekstrak / menampilkan bila file output SPSS atau tabel koefisien B tersedia. Untuk saat ini saya memakai angka jalur tertera di Tabel 4.6.

Interpretasi hasil (pemahaman utama)

1. Sumber daya (X2) adalah faktor dominan: dengan pengaruh total 70,81%, X2 merupakan determinan utama efektivitas kerja dan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Ini berarti ketersediaan SDM yang memadai, kapabilitas teknis, anggaran, dan

dukungan teknologi menjadi kunci. (lihat Tabel 4.6).

2. Komunikasi (X1) signifikan tapi kontribusi relatif kecil: hasil t menunjukkan X1 signifikan ($t = 2.562$; $p = 0.0065$), dan pengaruh total 10,89% — menunjukkan bahwa memperbaiki alur informasi dan konsistensi sosialisasi kebijakan berdampak nyata, walaupun tidak sebesar X2.
3. Disposisi (X3) berperan negatif (pengaruh total -5,59%): meskipun beberapa indikator disposisi memperoleh skor "baik" secara deskriptif, hasil jalur menunjukkan efek total negatif terhadap efektivitas. Uji t juga menunjukkan X3 tidak signifikan ($t = 1.561$; $p = 0.06$). Temuan ini mengindikasikan adanya masalah sikap, motivasi, atau resistensi implementasi di tingkat pelaksana yang justru mengurangi efektivitas. Perlu intervensi manajerial (pelatihan, insentif, pembinaan).
4. Struktur birokrasi (X4) berpengaruh positif kecil: X4 signifikan parsial ($t = 1.903$; $p = 0.03$) namun kontribusi total hanya 5,80% — menyiratkan bahwa perbaikan prosedur dan pembagian tugas bermanfaat, tetapi tidak cukup menggantikan kebutuhan sumber daya dan komunikasi.
5. Model kuat secara keseluruhan: $R^2 = 0,8190$ dan F signifikan (66.755; $p = 0.000$) mengindikasikan model menjelaskan bagian besar variasi efektivitas kerja terkait pengelolaan BMD → potensi peningkatan PAD. Namun masih ada ~18% faktor lain (mis. budaya organisasi, dukungan politik,

kondisi pasar sewa aset) yang perlu diteliti lebih lanjut.

Ringkasan Rekomendasi Singkat Berdasarkan Hasil

1. Prioritaskan investasi pada sumber daya: rekrutmen, pelatihan teknis SIMBADA / sistem aset digital, alokasi anggaran operasional. (Karena X2 dominan).
2. Perbaiki saluran komunikasi kebijakan: sosialisasi reguler, manual prosedur yang mudah diakses, dashboard pelaksanaan. (X1 signifikan).
3. Tangani isu disposisi: program motivasi, penataan tugas sesuai kompetensi, sistem reward/penilaian kinerja untuk mengubah pengaruh negatif X3.
4. Sederhanakan struktur birokrasi bila perlu: evaluasi alur kerja yang menghambat pelaksanaan dan pemanfaatan aset.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap efektivitas kerja aparatur dan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Indramayu. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, uji simultan, uji parsial, serta analisis jalur (path analysis), diperoleh beberapa kesimpulan berikut:

1. Implementasi Permendagri No. 7/2024 terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja aparatur. Hal ini terlihat dari nilai F hitung 66.755 dengan signifikansi 0.000, yang

menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara simultan memengaruhi efektivitas kerja. Koefisien determinasi $R^2 = 0.8190$ menegaskan bahwa 81.90% variasi efektivitas kerja dapat dijelaskan oleh implementasi kebijakan tersebut.

2. Secara parsial, tiga variabel implementasi kebijakan berpengaruh signifikan, yaitu komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

Variabel sumber daya (X2) menjadi faktor paling dominan dengan pengaruh total 70.81%, diikuti komunikasi (10.89%) dan struktur birokrasi (5.80%). Sebaliknya, variabel disposisi (X3) tidak signifikan secara statistik dan menghasilkan pengaruh total negatif, yaitu -5.59%, menunjukkan adanya hambatan sikap atau motivasi pelaksana dalam penerapan kebijakan.

3. Analisis jalur menunjukkan adanya pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel.

Sumber daya memberikan pengaruh langsung terbesar terhadap efektivitas kerja, sementara komunikasi dan struktur birokrasi berkontribusi melalui peningkatan konsistensi prosedur dan kejelasan implementasi pedoman BMD. Efek negatif pada disposisi mengindikasikan perlunya intervensi manajerial untuk memperbaiki sikap pelaksana kebijakan.

4. Implementasi kebijakan terbukti mendukung peningkatan PAD melalui optimalisasi pengelolaan BMD.

Efektivitas kerja aparatur dalam penatausahaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan aset daerah menjadi faktor penentu kontribusi PAD, terutama melalui pemanfaatan aset idle dan peningkatan akurasi administrasi aset.

Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Permendagri No. 7 Tahun 2024 merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas kerja aparatur dan mendorong optimalisasi PAD Kabupaten Indramayu.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, khususnya BKAD, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan BMD:

Penguatan Sumber Daya (Prioritas Utama)

Karena variabel sumber daya memberikan pengaruh terbesar (70.81%), maka disarankan:

- meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan intensif terkait SIMBADA, penilaian aset, dan administrasi BMD;
- menambah jumlah SDM pada unit pengelola BMD untuk mengurangi beban kerja yang berlebih;
- menyediakan sarana teknologi informasi yang memadai untuk mempercepat proses pencatatan dan pelaporan aset.

Perbaikan Sistem Komunikasi Kebijakan

Dengan kontribusi komunikasi sebesar 10.89%, perlu:

- memperkuat sosialisasi internal mengenai Permendagri No. 7/2024;
- menyusun pedoman operasional yang mudah dipahami oleh seluruh aparat;
- memastikan konsistensi instruksi antara pimpinan dan pelaksana teknis agar tidak terjadi misinterpretasi.

Evaluasi Disposisi Pelaksana

Karena disposisi berdampak negatif (–5.59%), maka perlu dilakukan:

- pembinaan motivasi dan perubahan perilaku aparat melalui coaching, mentoring, dan reward system;
- penyelarasan persepsi pelaksana terhadap tujuan kebijakan;
- monitoring rutin terhadap sikap pelaksana terhadap perubahan prosedural.

Penguatan Struktur Birokrasi dan SOP

Karena struktur birokrasi berpengaruh signifikan (5.80%), maka:

- SOP pengelolaan aset perlu disederhanakan, diperbarui, dan disesuaikan dengan Permendagri No. 7/2024;
- mekanisme pelaporan aset harus dipersingkat melalui digitalisasi formulir dan alur verifikasi;
- pembagian tugas antarunit kerja perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang-tindih penanganan aset.

Optimalisasi Pemanfaatan Aset untuk Peningkatan PAD

Untuk meningkatkan PAD melalui aset daerah:

- lakukan identifikasi dan verifikasi menyeluruh aset idle;
- lakukan penilaian ulang nilai aset untuk memastikan akurasi harga sewa dan kerja sama pemanfaatan;
- memperluas kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak swasta melalui skema BOT, BGS, atau sewa jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2021). *Organizations: Behavior, structure, processes* (15th ed.). McGraw-Hill.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Handayani, R. (2020). Pengaruh jaminan dan empati terhadap kepuasan peserta layanan tatap muka BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 134–145.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (3rd ed.). Sage Publications.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Johnston, J., & Kouzmin, A. (1997). Public sector performance measurement: Emerging issues. *Public Productivity & Management Review*, 20(4), 299–307.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education.
- Kwon, M. (2014). Public asset management: A comparative study. *International Journal of Public Administration*, 37(5), 299–311.

- Lane, J. E. (2000). *New public management*. Routledge.
- Mangkunegara, A. A. P. (2020). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (5th ed.). Andi Offset.
- Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis* (4th ed.). Oxford University Press.
- Putri, S. N. (2022). Kualitas layanan dan kepuasan peserta sektor mandiri BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 45–58.
- Rahmatullah, A. (2021). Pengaruh bukti fisik terhadap persepsi kenyamanan peserta BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Publik*, 5(3), 211–222.
- Savas, E. S. (2012). *Privatization and public-private partnerships*. Chatham House.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Schedler, K., & Proeller, I. (2007). *Public management*. Springer.
- Simons, R. (2000). *Performance measurement & control systems for implementing strategy*. Prentice Hall.
- Sulastri, D. (2019). Analisis kualitas pelayanan BPJS Kesehatan terhadap kepuasan peserta. *Jurnal Pelayanan Publik Indonesia*, 7(1), 59–68.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- World Bank. (2016). *Public asset management: A systematic approach*. World Bank Publications.
- Agranoff, R. (2007). *Managing within networks: Adding value to public organizations*. Georgetown University Press.
- Andrews, R., Boyne, G. A., & Walker, R. M. (2011). The impact of management on administrative and survey measures of organizational performance. *Public Management Review*, 13(2), 227–255.
- Barzelay, M. (2001). *The new public management: Improving research and policy dialogue*. University of California Press.
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2009). *Public management and governance* (2nd ed.). Routledge.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). Wiley.
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The whole-of-government approach to public sector reform. *Public Administration Review*, 67(6), 1059–1066.
- Kaganova, O. (2012). Guidebook on public sector asset management. *The Urban Institute*. (Referensi klasik untuk manajemen aset pemerintah.)
- Lindquist, E. (2009). Organizing for policy implementation: The emergence and role of implementation units in policy design and

oversight. *Journal of Comparative Policy Analysis*, 11(3), 255–281.

Perry, J. L., & Wise, L. R. (1990). The motivational bases of public service. *Public Administration Review*, 50(3), 367–373.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.